

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah perkebunan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kolonialisme, dan kapitalisme. Di negara-negara berkembang pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris barat, yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Bangsa Indonesia sejak awal masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor perkebunan, karena sektor ini memiliki arti yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan berbagai realitas sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Perkembangan perkebunan itu sendiri pada satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia, memberi keuntungan finansial yang besar, serta membuka kesempatan ekonomi baru, namun pada sisi yang lain perkembangan perkebunan juga dianggap kendala bagi diversifikasi ekonomi masyarakat yang lebih luas, sumber penindasan, salah satu faktor penting yang menimbulkan kemiskinan struktural (Bambang dalam Septinawati : 2010 : 1).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan areal perkebunan terluas di dunia. Sampai dengan tahun 2010, luas areal perkebunan di Indonesia mencapai 19 juta hektar. Dari total tersebut, 83%-nya merupakan perkebunan besar yang dikelola pemerintah maupun swasta (Direktorat Jendral Perkebunan 2010 dalam Berwel : 2012: 1). Perkebunan di Indonesia di dominasi oleh perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit, karet, kopi, tembakau, kakao, kelapa, teh, jambu mete, nilam dan sejumlah tanaman rempah lainnya. Besarnya potensi perkebunan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan perkebunan yang cukup baik di Indonesia. Pada tahun 2010, data Ditjen Perkebunan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan areal sektor perkebunan di Indonesia mencapai 2,04% pertahun. Sementara untuk laju pertumbuhan produksi perkebunan Indonesia mencapai 5,96% pertahun. Dengan laju pertumbuhan produksi tersebut, potensi produksi perkebunan Indonesia pada tahun 2010 mencapai 34,6 juta ton dan tahun 2011 mencapai 36,9 juta ton.

Jenis perkebunan di Indonesia meliputi perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat merupakan perkebunan yang dikelola oleh rakyat secara mandiri dan pengelolaannya lebih bersifat tradisional. Sementara perkebunan besar merupakan perkebunan yang dikelola oleh pihak pemerintah dan swasta. Pengelolaan perkebunan pemerintah di Indonesia dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). Pengelolaan perkebunan oleh PTPN dibagi ke dalam 13 wilayah perkebunan yang menyebar diseluruh daerah di Indonesia. PTPN merupakan perusahaan yang mengelola sektor perkebunan dengan status sebagai perusahaan negara. PTPN banyak menguasai perkebunan-perkebunan besar di berbagai daerah (Ditjen Perkebunan : 2009 dalam Berwel : 2012 : 2).

Salah satu perkebunan di Indonesia ialah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berkembang pesat melalui berbagai upaya pengembangan, baik yang dilakukan oleh perkebunan besar, proyek-proyek pembangunan maupun swadaya masyarakat. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit selama tujuh tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan yakni berkisar 2,03 sampai dengan 9,05 % per tahunnya. Pada tahun 2004 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 5,72 juta hektar, meningkat menjadi 7,95 hektar pada tahun 2009. Pada tahun 2010 diperkirakan luas perkebunan sawit masih akan meningkat sebesar 2,03 persen dari tahun 2009 menjadi 8,11 juta hektar (BPS 2010 dalam Rani 2015 : 3).

Menurut penguasaannya, sebagian besar perkebunan kelapa sawit pada tahun 2013 diusahakan oleh perkebunan besar swasta dengan luas perkiraan  $\pm$  5.381.166 Ha, sedangkan perkebunan rakyat mengusahakan seluas  $\pm$  4.356.087 Ha dan perkebunan besar negara seluas  $\pm$  727.767 Ha. Perkebunan kelapa sawit tersebar di 23 Provinsi di Indonesia. Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. selain provinsi Riau, Sumatera Barat merupakan provinsi yang berpotensi dalam hasil perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada lampiran 1 (Direktorat Jendral Perkebunan 2013-2015).

Menurut Dinas Perkebunan Sumatera Barat (2006) usaha perkebunan kelapa sawit di provinsi Sumatera Barat dikelola dalam 3 bentuk, yaitu: (1) perkebunan besar yang dikelola oleh BUMN, (2) perkebunan besar yang dikelola

oleh perusahaan swasta besar, dan (3) perkebunan rakyat yang dikelola oleh rumah tangga dalam bentuk usaha perorangan. Perkebunan rakyat mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan peran sub sektor perkebunan kedepan, sedangkan pada sisi produktivitas, perkebunan rakyat masih tertinggal dibandingkan perkebunan besar negara dan swasta. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh kurangnya permodalan dan penguasaan teknologi, sehingga perkebunan rakyat umumnya ditandai dengan jarak tanam yang kurang teratur, tidak ada perencanaan penggantian tanaman yang teratur sesuai umur tanaman dan sebagainya (Daim, 2003 dalam Hermansyah : 2011 : 3).

Menurut Mulyana dalam Batubara (2008 :1-2) khususnya untuk perkebunan rakyat, tujuan utama pengembangannya adalah untuk mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani melalui pengembangan kebun. Tujuan lainnya yang lebih luas lagi yaitu, pengembangan masyarakat pekebun yang berwiraswasta, sejahtera dan selaras dengan lingkungannya, dan mewujudkan perpaduan usaha yang didukung oleh suatu sistem dengan memadukan berbagai kegiatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Namun demikian diperoleh informasi bahwa telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu masalah yang dipertentangkan adalah penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS).

Untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga TBS produksi petani yang wajar serta menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), telah menyebabkan departemen teknis terkait dan pemerintah di beberapa daerah secara langsung melakukan intervensi. Beberapa bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya adalah Permentan No. 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi. Ruang lingkup peraturan ini meliputi rumus harga pembelian TBS, pembinaan dan sanksi. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi petani (Departemen Pertanian, 2007 dalam Wilson PAP : 2010 : 2).

Salah satu permasalahannya adalah penentuan nilai K (proporsi yang diterima oleh petani) oleh pemerintah yang menunjukkan kecenderungan bahwa harga TBS yang berlaku masih rendah dari harga yang seharusnya diterima oleh petani. Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketidakserasian hubungan antara petani dengan perusahaan inti (PKS/agen pembeli). Masalah ini diduga masih menempatkan posisi petani lebih lemah dan sangat dipengaruhi oleh perilaku perusahaan, meskipun telah merujuk pada Rumus Pembelian Harga (Didu, 2000 dalam Wilson : 2010 : 3).

Perkebunan rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat tersebar di beberapa kabupaten, salah satunya ialah kabupaten Solok Selatan yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit rakyat yang cukup luas dapat dilihat pada lampiran 2. Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi perkebunan yang cukup tinggi salah satunya pada komoditi kelapa sawit. Komoditi kelapa sawit di kelola oleh perusahaan besar dan petani pekebun. Petani kelapa sawit di kabupaten Solok Selatan memiliki kendala yang mendasar yaitu ketidakberdayaan petani dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Keadaan seperti ini dikatankan bahwa posisi tawar petani lemah.

## **B. Rumusan Masalah**

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai luas wilayah 3.346,20 km<sup>2</sup> dan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 156.901 penduduk (orang) dapat dilihat pada lampiran 3 (Badan pertanahan Nasional 2015 dan BPS Provinsi Sumatera Barat 2015).

Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi yang cukup penting untuk perkebunan kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Solok Selatan adalah 1.272 hektar (Direktorat Jenderal Perkebunan 2013-2015).

Kabupaten Solok selatan yang memiliki 12 perusahaan besar yang terdiri dari 10 perusahaan besar pengolahan kelapa sawit dan 2 perusahaan besar pengolahan teh. Keadaan geografi dan topografi di Kabupaten Solok Selatan yang mendukung dan sesuai untuk kegiatan pertanian merupakan faktor pendukung

bagi masyarakat untuk memilih profesi sebagai petani. Kecamatan Sangir Balai Janggo merupakan daerah yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Kecamatan Sangir Balai Janggo yang memiliki 4 nagari, dimana masing-masing nagari mempunyai luas yang berbeda dan penguasaan lahannya pun berbeda setiap nagari. Pada Nagari Sungai Kunyit masyarakat memilih berusahatani kelapa sawit dan juga karet.

Perkebunan kelapa sawit bukan pertanian yang tidak memiliki resiko. Perkebunan rakyat dan perkebunan yang diusahakan oleh negara ataupun swasta sangat memiliki perbedaan dalam pengelolaannya dan dapat menyebabkan perbedaan pula pada segi produksi. Melihat keadaan petani kelapa sawit dilapangan memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga yang di peroleh petani. Hal seperti ini di alami petani pada saat musim hujan dimana produksi kelapa sawit memang cenderung meningkat akan tetapi buah yang dihasilkan juga cenderung akan cepat busuk apabila terlalu lama didiamkan atau tidak segera di bawa ke pabrik pengolahan. Apabila kondisi TBS (Tandan Buah Segar) tersebut mengalami busuk, maka pedagang pengumpul akan membeli TBS dengan harga yang cukup rendah. Dengan keadaan seperti ini maka petani tidak memiliki posisi yang kuat untuk melakukan penawaran harga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pedagang pengumpul yang memiliki posisi tawar yang kuat. Sedangkan pada saat musim panas produksi kelapa sawit atau TBS akan sedikit menurun dibandingkan pada saat musim hujan, akan tetapi pada saat ini TBS yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik. Pada saat inilah petani dapat melakukan tawar-menawar dengan pedagang pengumpul, maka akan terlihat mana yang memiliki posisi tawar yang kuat dan yang lemah.

Melihat harga TBS yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan yang ada di Nagari Sungai Kunyit yaitu PT. Perkebunan Nusantara VI, yaitu pada bulan Februari 2018 harga TBS yaitu Rp 1.200/Kg) , pada bulan Maret 2018 yaitu Rp 1320/Kg, dan pada bulan April 2018 harga TBS sebesar Rp 1450/Kg dapat dilihat pada lampiran 4. Pada keadaan ini harga yang diberikan perusahaan cukup tinggi akan tetapi petani yang menjual hasil produksinya kepada pedagang pengumpul akan mendapatkan harga dibawah harga yang dikeluarkan pada perusahaan. Pedagang pengumpul akan mencari keuntungan setelah menutupi

biaya yang dikeluarkan untuk menjual TBS kepada perusahaan. Pedagang pengumpul akan mengambil 15-25% dari harga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Permasalahan lainnya seperti penetapan nilai K (proporsi yang diterima oleh petani) oleh pemerintah, dimana penetapan nilai K tersebut menunjukkan kecenderungan harga TBS yang diterima oleh petani tergolong masih rendah dari harga yang seharusnya diterima oleh petani. Pedagang juga akan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya jika kondisi TBS baik maka harga akan dapat disesuaikan, tetapi apabila kondisi TBS rusak atau busuk maka harga yang diterima oleh petani akan turun. Kemudian juga ditambah dengan petani yang memiliki kredit atau pinjam kepada para pedang, maka harga yang diterima oleh petani akan semakin rendah, hal ini membuat petani semakin sulit untuk membebaskan diri dari para pedagang tersebut.

Petani lebih memilih untuk menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak. Dalam hal ini petani mendapatkan harga yang cukup rendah untuk hasil produksinya. Dimana petani akan mengurangi harga beli sebanyak 25% dari harga yang ditetapkan pada PKS. Dengan harga Rp. 1.200/kg yang ditetapkan PKS maka tengkulak akan menetapkan harga sekitar Rp. 950/kg. ketidakberdayaan petani dalam bernegosiasi dalam menetapkan harga hasil produksi inilah yang mengakibatkan posisi tawar petani menjadi lemah.

Melihat kondisi dan kendala yang dimiliki oleh para petani dalam menetapkan harga hasil produksinya, maka akan dapat dilihat seberapa kuat dan lemah posisi tawar petani kelapa sawit terhadap penetapan harga TBS tersebut. Dari uraian permasalahan diatas, maka muncul pertanyaan penelitian :

1. Bagaimanakah karakteristik petani kelapa sawit di Nagari Sungai Kunyit?
2. Bagaimanakah hubungan karakteristik usahatani kelapa sawit dengan posisi tawar petani kelapa sawit dalam penetapan harga TBS di Nagari Sungai Kunyit?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Analisis Posisi Tawar Petani Kelapa Sawit Dalam Penetapan Harga TBS (Tandan Buah Segar) Di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.**

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui karakteristik petani kelapa sawit yang ada di Nagari Sungai Kunit.
2. Mengetahui hubungan karakteristik usahatani kelapa sawit terhadap posisi tawar petani kelapa sawit dalam penetapan harga TBS di Nagari Sungai Kunit.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengetahui posisi tawar petani dalam penetapan harga TBS (Tandan Buah Segar) di tingkat petani.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- b. Menjadi salah satu bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Untuk instansi terkait, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pedoman pembuatan kebijakan dan untuk penyelesaian masalah penetapan harga khususnya dalam menentukan harga TBS (Tandan Buah Segar) di lingkup petani.